

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	15
C. TUJUAN DAN KE GUNAAN PENELITIAN	15
D. KERANGKA PEMIKIRAN	16
E. METODE PENELITIAN	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENCALOAN KEPALA DAERAH	22
A. Tinjauan Umum Negara Hukum	22
1. Teori-Teori Negara Hukum	24
2. Implementasi Negara Hukum	27
B. Tinjauan Umum Negara Demokrasi	38
1. Teori-Teori Negara Demokrasi	42
2. Implementasi Negara Demokrasi	49
C. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah	54
1. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56
2. Pencaalonan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60
BAB III TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015	68
A. Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusionalitas Indonesia	68
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	70
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	73
B. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi	78

1. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	80
2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	87
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.....	91
1. Tinjauan Kasus Perini.....	92
2. Pertimbangan - Pertimbangan.....	94
3. Putusan.....	102
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015	105
A. Pembatasan Pencalonan Kepala Daerah ditinjau dari Konsep Negara Demokratis dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.....	105
B. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap Ancaman Proses Regenerasi Pimpinan Kepala Daerah.....	111
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	x

